

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pakistan adalah negara yang padat dengan tarik menarik seteru sipil dan militer dalam memerintah. Selain itu Pakistan juga dikenal sebagai negara yang penuh dengan kekerasan. Dari awal berdiri hingga saat ini, berbagai macam bentuk kekerasan masih terjadi di Pakistan. Bahkan sejak kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947, tercatat telah terjadi empat kali kudeta.

Pemberlakuan status darurat militer di Pakistan pada tanggal 3 November 2007 oleh Jenderal Pervez Musharraf, menambah catatan buruk dalam sejarah Pakistan. Pemberlakuan status darurat militer ini merupakan sebuah ironi, karena keputusan Jenderal Pervez Musharraf ini justru melemahkan demokrasi di Pakistan.

Peristiwa ini mengundang kecaman dari berbagai pihak. Selain dari masyarakat Pakistan, berbagai macam kritik ditujukan kepada Jenderal Pervez Musharraf termasuk dari Amerika Serikat, negara yang selama ini selalu menjadi pendukung utama pemerintahan Musharraf. Kecaman tersebut ditujukan kepada Jenderal Pervez Musharraf karena tindakannya tersebut dianggap inkonstitusional. Selain itu, keputusan Musharraf tersebut bertolak belakang dengan janjinya untuk memulihkan keamanan di Pakistan. Keputusan Pervez Musharraf memberlakukan status darurat militer diduga karena Musharraf mulai kehilangan legitimasinya

Berkaitan dengan peristiwa tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Jenderal Pervez Musharraf berupaya mempertahankan legitimasinya di Pakistan.

B. Latar Belakang Masalah

Pakistan adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Arab di sebelah selatan, Afghanistan dan Iran di barat, serta India dan China di Timur jauh. Pakistan yang beribukota di Islamabad mempunyai jumlah penduduk terbanyak ke 6 di dunia yaitu 161.488.000 jiwa yang mayoritas penduduknya merupakan warga muslim sunni.

Pakistan adalah negara yang muncul di atas peta dunia pada 14 Agustus 1947. Negara ini memulai lembaran baru dan memiliki dua pilihan. Pertama, menjadi negara demokrasi. Pakistan menerima warisan institusi dan pengalaman dalam menjalankan demokrasi dari Inggris. Pilihan lain adalah menjadi kesultanan atau emirat. Gerakan pemisahan Pakistan didorong oleh teori bahwa warga muslim di India adalah satu negara, dan mereka berhak mendirikan negara sendiri. Pemerintah kolonial Inggris memberi mereka hak untuk memilih, dan mengizinkan identitas ke-Islaman mereka gunakan sebagai slogan pemilihan pada tahun 1937 dan 1946. namun para pemimpin awal negara itu tidak mengambil pilhan tegas dan memutuskan untuk menggabungkan kedua bentuk negara, yang kemudian tanpa diadani dengan serangkaian masalah politik, hukum, dan keagamaan yang

Sejarah Pakistan mencatat tentang adanya tarik menarik yang tiada henti antara kalangan sipil dan militer di satu sisi, dan kekuatan liberal dan keagamaan di sisi lain. Bahkan sejak memperoleh kemerdekaannya, negara ini telah mengalami beberapa kali kudeta.

Tabel 1.1

Tabel Kudeta yang terjadi di Pakistan

Tahun	Tokoh	Pemerintahan yang dikudeta
1958	Ayub Khan	Iskandar Mirza
1969	Yahya Khan	Ayub Khan
1977	Zia-ul-Haq	Zulfikar Ali Bhutto
1999	Pervez Musharraf	Nawaz Sharif

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Pervez_Musharraf

Selain diwarnai dengan kudeta, sejak kemerdekaan Pakistan pada 1947, konflik antar etnik dan gerakan separatisme yang berlandaskan etnik nasional juga tidak pernah berhenti hingga saat ini. Seperti misalnya pada tahun 1970-an, kerusuhan politik yang dipicu oleh gerakan separatisme di Balochistan telah menyulut perang saudara. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2007 terjadi kerusuhan yang cukup besar di Masjid Merah. Pemerintahan Musharraf mengerahkan aparatnya menyerbu Masjid Merah. Penyerangan ini dilakukan dengan dalih memberangus gerakan radikal ala Taliban. Dan tentu saja masih banyak kerusuhan-kerusuhan lainnya yang terjadi di Pakistan.

Kerusuhan dan konflik yang terjadi di Pakistan salah satunya disebabkan karena militer di Pakistan sering memasuki wilayah politik demi kekuasaan¹. Banyak politisi, jenderal, pemimpin perang, dan kepala suku yang memiliki kekuatan dan pengaruh di Pakistan. Beberapa saat setelah Pakistan terbentuk pada 14 Agustus 1947, keadaan darurat berulang kali diberlakukan menyusul pecahnya kekerasan komunal yang menewaskan sekitar 500.000 jiwa.

Pada tanggal 3 november 2007 keadaan darurat kembali diberlakukan di Pakistan oleh Pervez Musharraf. Pemberlakuan status darurat militer ini terjadi menjelang keputusan MA mengenai sah tidaknya kemenangan Pervez Musharraf dalam Pemilu pada bulan Oktober 2007. Dari berbagai sumber, diperoleh informasi bahwa kemungkinan MA hendak memutuskan bahwa pencalonan Pervez Musharraf tidak sah.

Sehari setelah pemberlakuan status darurat militer tersebut, terjadi penangkapan sejumlah aktivis di Pakistan. Polisi yang menyandang senapan laras panjang mengepung ratusan pemimpin oposisi dan aktivis. Selain itu, Pervez Musharraf juga membekukan konstitusi, memecat Ketua Mahkamah Agung yang akan segera memutuskan sah tidaknya pencalonan kepresidenan Musharraf, dan mengerahkan tentara untuk memerangi apa yang disebut sebagai meningkatnya ekstrimisme Islam.

Keputusan Musharraf untuk memberlakukan status darurat militer di Pakistan menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Banyak kalangan menilai

bahwa pemberlakuan status darurat militer yang dilakukan Pervez Musharraf kali ini lebih disebabkan karena Musharraf merasa jika legitimasinya mulai merosot.

Popularitas Pervez Musharraf belakangan memang terpuruk. Hal ini disebabkan karena Pervez Musharraf dianggap berkoalisi dengan AS dan barat. Sejak Musharraf membuat keputusan untuk memihak Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme, praktis dukungan rakyat Pakistan terhadapnya menurun. Karena berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh WorldPublicOpinion.org, sekitar 50% masyarakat Pakistan tidak setuju hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat.² Selain itu kepercayaan, rakyat Pakistan terhadap Pervez Musharraf juga menurun. Rakyat Pakistan menganggap Musharraf tidak mampu menangani krisis yang terjadi di Pakistan. Bahkan setiap keputusan Musharraf sering kali tidak berpihak kepada rakyat Pakistan. Tampaknya Pervez Musharraf bermaksud menyelamatkan kekuasaannya melalui deklarasi keadaan darurat yang dikeluarkan pada tanggal 3 November tersebut.³ Berbagai macam alasan digunakan Pervez Musharraf untuk melegalkan keputusannya tersebut, meskipun keputusan memberlakukan status darurat ditentang oleh banyak pihak.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yaitu :

”Bagaimana upaya Pervez Musharraf mempertahankan legitimasinya di Pakistan?”

² *Debat Pakistan: Jajak Pendapat Demokrasi Islam* (diakses pada 20 Agustus 2009); diambil dari

D. Kerangka Pemikiran

Skripsi ini menggunakan beberapa konsep dan teori untuk menjawab pertanyaan di atas. Salah satu konsep yang digunakan dalam skripsi ini adalah konsep bagaimana *Cara Mendapatkan Legitimasi*. Sebelum lebih jauh memaparkan kerangka teori perlu diketahui pengertian antara kekuasaan (power) dan kewenangan (authorithy) setelah itu baru legitimasi. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun di antara ilmuwan politik tidak ada kesepakatan mengenai makna kekuasaan. Beberapa di antaranya bahkan menganjurkan agar konsep kekuasaan ditinggalkan karena bersifat kabur, dan berkonotasi emosional. Namun, tampaknya politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan konsep kekuasaan dengan cara menempatkan dalam konteks proses politik secara lebih proporsional.

Kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Menurut Robert Dahl, A dikatakan memiliki kekuasaan atas B apabila A dapat mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B.⁴ namun, rumusan inipun menimbulkan persoalan mengenai apakah seseorang atau suatu Negara dapat dikatakan mempunyai kekuasaan setiap kali kehendak (tujuannya) terpenuhi? Untuk mengatasi hal ini, dikemukakan setiap hubungan kekuasaan harus memenuhi dua persyaratan, yakni tindakan itu dilaksanakan baik oleh yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi, dan terdapat kontak atau komunikasi antara keduanya baik langsung atau tidak langsung.

⁴ Robert Dahl, *Demokrasi dan Kekuasaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Ltd, 1977), 20.

Definisi kekuasaan menurut Ramlan Surbakti adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Secara lebih sempit kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.⁵

Sebagaimana dikemukakan di atas setelah kita mengetahui definisi kekuasaan, maka setelah itu penulis akan memaparkan definisi kewenangan (authority). Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Menurut Ramlan Surbakti, kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Dengan kata lain kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Dalam hal ini, hak moral yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan.⁶ Weber mendefinisikan kewenangan sebagai probabilitas bahwa perintah-perintah tertentu atau seluruh perintah akan ditaati oleh sekelompok orang.⁷

Sedangkan legitimasi didefinisikan sebagai hubungan antar pemimpin dan yang dipimpin. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 50.

⁶ *Ibid*

⁷ Charles Adrain. *Political and Social Change: An Introduction to Political Science*, Dalam dra.St.

kewenangan. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Setelah diketahui pengertian legitimasi perlu disebutkan sebab-sebab terjadinya krisis legitimasi. *Lucyan Pye* menyebutkan empat sebab terjadinya krisis legitimasi. Pertama, prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain. Artinya prinsip kewenangan yang selama ini digunakan tidak lagi diakui masyarakat, dan masyarakat sudah menemukan prinsip kewenangan lain yang dianggap lebih baik sehingga pemerintah yang mendasarkan pada prinsip kewenangan lama akan kehilangan dukungan. Kedua, persaingan yang sangat tajam dan tidak sehat tetapi juga tidak disalurkan melalui prosedur yang seharusnya di antara para pemimpin pemerintah sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintah. Perpecahan semacam ini menimbulkan kelumpuhan pemerintahan sehingga masyarakat tidak akan menaati kewenangan yang ada. Ketiga, pemerintah tidak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Kekecewaan dan keresahan berakibat mundurnya dukungan kepada pemerintah. Keempat, sosialisasi tentang kewenangan mengalami perubahan. Apabila selama ini anggota masyarakat disosialisasikan oleh orang tua di lingkungan yang hanya taat dan mengharapkan sepenuhnya dari pihak berwenang maka dengan meluasnya pendidikan dan media massa, pola sosialisai tentang kewenangan juga berubah. Perubahan ini tidak hanya menjadi rasional kritis terhadap kewenangan tetapi juga partisipatif dalam politik. Akibatnya setiap

tindakan pemerintah yang berwenang yang dianggap menyimpang dari hal yang seharusnya atau dianggap tidak sesuai dengan aspirasi yang hidup dalam masyarakat akan dipersoalkan oleh masyarakat. Krisis legitimasi akan semakin gawat manakala pihak yang berwenang tidak tanggap atas perubahan sikap terhadap kewenangan dalam masyarakat. Dalam kenyataan yang menyebabkan krisis legitimasi acapkali tidak hanya satu faktor, tetapi dua atau lebih dari keempat faktor tersebut atau faktor-faktor lain yang belum disebutkan di sini.

Terdapat 5 cara yang dapat digunakan atau dikombinasikan oleh penguasa untuk merespon merosotnya legitimasi⁸:

1. Menolak mengakui kelemahan yang semakin bertambah, dengan harapan atau keyakinan bahwa mereka (penguasa) bagaimanapun akan tetap berkuasa.
2. Berupaya untuk bertahan dengan semakin represif, menggantikan kewajiban yang sudah habis dengan kepatuhan yang dipaksakan.
3. Menciptakan konflik dengan negara asing dan berusaha memulihkan legitimasi dengan memanfaatkan rasa kebangsaan.
4. Berupaya menciptakan legitimasi yang mirip dengan legitimasi demokrasi untuk rezim mereka.
5. Mengakhiri rezim otoriter serta memulai demokrasi.

⁸ Samuel P Huntington, *Colombian Democracies in Crisis*, diterjemahkan oleh Anil Merdeka (Jakarta :

Konsep Legitimasi Menurut Max Weber :

Menurut Max Weber, untuk dapat mempertahankan kekuasaannya, penguasa dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan melakukan tindakan positif, seperti pembangunan bidang ekonomi dan militer.
2. Dengan melakukan tindakan rasional, seperti menciptakan hukum yang memberi tempat bagi pemimpin yang berkuasa.
3. Dengan membangkitkan emosi rakyat, misalnya dengan menciptakan musuh bersama yang dapat digunakan untuk menyatukan rakyat.
4. Menggali sumber-sumber primordial, seperti membangun sentiment keagamaan dan melibatkan anggota keluarga dan pemerintah.

Konsep Legitimasi Menurut Michael C. Hudson :

Bahwa ada tiga sumber legitimasi yang dapat digunakan oleh penguasa untuk dapat mempertahankan kekuasaan atau pemerintahannya yaitu :

1. Menggali sumber-sumber personal, misalnya dengan mengemukakan ide-ide yang luar biasa, sehingga rakyat bersimpati terhadapnya.
2. Dengan melalui ideology tertentu, seperti sosialisme.
3. Structural, dengan membangun struktur politik melalui institusi politik seperti birokrasi dan hukum.⁹

⁹ Michael C. Hudson, *The Search For Legitimation* (New Haven: Yale University Press, 1977), 10-27

Tipe-tipe legitimasi :

Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat dan pemerintah, maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu :

Pertama, *Legitimasi tradisional*, yakni masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin “berdarah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat.

Kedua, *Legitimasi ideology*, yakni masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideology. Ideology yang dimaksud tidak hanya doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalism dan gabungan keduanya.

Ketiga, *Legitimasi kualitas pribadi*, yakni masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa charisma maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang seni budaya tertentu.

Keempat, *Legitimasi procedural*, yakni masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kelima, *Legitimasi Instrumental*, yakni masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut

menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.

Legitimasi dapat berarti sebagai wujud hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi berkaitan apakah rakyat menerima atau tidak hak moral pemimpin untuk membuat keputusan-keputusan atas mereka, dan hanya rakyat yang dapat memberikan legitimasi.¹⁰ Selain itu, legitimasi juga diartikan kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa dapat diterima secara baik, karena sesuai dengan azas-azas dan prosedur yang berlaku dan dianggap wajar. Jadi legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.¹¹

E. Hipotesa

Pervez Musharraf berupaya mempertahankan legitimasinya dengan cara memberlakukan status darurat militer di Pakistan

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistem analisa kualitatif melalui metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Data pengamatan terhadap objek dikumpulkan melalui penelitian pustaka (Library research). Teknik ini digunakan untuk menganalisa data yang bersumber dari :

¹⁰ Charles F. andarin, *Kehidupan politik dan Perubahan social*, Tiara Wacana Yogyakarta, 1992, hal.203

1. Buku-buku
2. Majalah dan surat kabar
3. Artikel dan jurnal Hubungan Internasional Laporan Penelitian
4. Internet atau Web Site

G. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pervez Musharraf memberlakukan status darurat militer di tengah-tengah upaya penegakan demokrasi di Pakistan.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari split (terlampau luas dan tidak terarah), maka penulis membatasi jangkauan penelitian. Yaitu, Pemerintahan Presiden Pervez Musharraf yang dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2007 yaitu pada saat diberlakukannya status darurat militer

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN PAKISTAN

Menjelaskan tentang sejarah politik Pakistan, sistem pemerintahan Pakistan, dan konflik yang terjadi di Pakistan.

BAB III PEMERINTAHAN PERVEZ MUSHARRAF

Menjelaskan tentang pemerintahan Pervez Musharraf, siapa saja yang menjadi kompetitornya, legitimasinya yang mulai menurun, dan peristiwa Tragedi Masjid Merah yang dianggapnya sebagai upaya pemeberantasan ekstrimisme Islam.

BAB IV PEMBERLAKUAN STATUS DARURAT MILITER